

ANALISIS PEMANFAATAN APLIKASI FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DALAM MEMENUHI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ANALYSIS OF THE USE OF THE FMIS APPLICATION IN FULFILLING THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL REPORTS FOR THE POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING SERVICES IN THE SANGIHE ISLANDS DISTRICT

Oleh:

Novi Fiona Samantha Budiman¹

Hendrik Manossoh²

Heince R. N. Wokas³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹smnthsbdmn@gmail.com

²hendrik_manossoh@unsrat.ac.id

³heincewokas@unsrat.ac.id

Abstrak: Digitalisasi mendorong sistem informasi digital tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis saja, namun juga pada pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemungkinan mengikuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan pendistribusian dana. aplikasi FMIS (*Financial Management Information System*) merupakan salah satu wujud pemanfaatan digitalisasi yang digunakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digital pada aplikasi FMIS dalam memenuhi akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Kep. Sangihe. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder, pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan digitalisasi pada Dinas PP & KB Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dalam penggunaan aplikasi FMIS terbilang sudah akuntabel dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan, juga memperkuat transparansi dan tata Kelola keuangan yang terintegrasi.

Kata kunci: Digitalisasi, Aplikasi FMIS, Akuntabilitas, Laporan Keuangan

Abstract: Digitalization encourages digital information systems to be used not only by business organizations, but also by governments. In Government Regulation no. 56 of 2005 concerning Financial Information Systems states that central and regional governments have the duty to develop and utilize advances in information technology to increase the possibility of following the implementation of development processes in accordance with the principles of good financial governance and distribution of funds. The FMIS (*Financial Management Information System*) application is one form of digitalization used by local governments. This research aims to analyze the use of digital in the FMIS application in fulfilling the accountability of the financial reports of the District Population Control and Family Planning Service. Kep. Sangihe. The type of research method used is qualitative research with a case study approach. The data used in this research is primary data, data collection through interviews and secondary data, data collection through documentation. The results of this research show that the use of digitalization in the PP & KB Department of Sangihe Islands Regency, which in using the FMIS application, is considered accountable and increases efficiency and effectiveness in financial management, also strengthens transparency and integrated financial governance.

Keywords: Digitalization, FMIS Application, Accountability, Financial Reports

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Digitalisasi mendorong sistem informasi dijalankan oleh hampir seluruh sumber daya manusia suatu organisasi sehingga menyebabkan hubungan operasi dan organisasi tidak terlepas. Perkembangan teknologi informasi digital tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis saja, namun juga pada organisasi publik termasuk pemerintah daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemungkinan mengikuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan pendistribusian dana. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah, informasi keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, n.d.). Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah (Rahayu, 2018).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang kemudian aplikasi ini dinamakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang termuat dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Kesesuaian hasil yang dihasilkan dengan menggunakan SIMDA memenuhi kriteria laporan keuangan yang efektif yaitu dapat dipercaya, ketepatan, tepat waktu, dan bentuk-bentuk laporan. (Dewi, Animah., & Mariadi, 2021).

Pengembangan penerapan SIMDA selanjutnya adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Financial Management Information System (SIMDA FMIS). Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu teknologi tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS) yang telah diterapkan di banyak organisasi untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. Aplikasi SIMDA FMIS dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Tujuan implementasi SIMD FMIS yaitu guna menghasilkan laporan keuangan akurat, lengkap, tepat waktu serta dapat diandalkan sesuai dengan peraturan (Rahmayanti dan Kurniati, 2023).

Pengelolaan keuangan dengan sistem informasi akuntansi pada suatu pemerintahan daerah harus dilandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan mempunyai akses terhadap informasi mengenai keberhasilan yang telah dicapai di daerah. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas. Laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan merupakan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas menurut SAP (Azzindani dan Irwan, 2020).

Permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi adalah penerapan teknologi digitalisasi itu sendiri baik dalam kaitannya dengan implementasi aplikasi FMIS berupa penginputan atau pembuatan laporan keuangan sangat bergantung dengan jaringan internet dan errornya sistem yang terkadang muncul karena banyaknya instansi yang mengakses aplikasi SIMDA FMIS serta penginputan data tidak otomatis sampai ke catatan atas laporan keuangan sehingga harus dilakukan penginputan satu per satu pada masing-masing laporan keuangan. Hal ini merupakan potensi kendala yang mungkin timbul pada pemerintahan daerah terkait dengan belum efisien atau optimalnya pemanfaatan teknologi digitalisasi pada instansi pemerintahan daerah, sehingga dapat mempengaruhi pelaporan keuangan yang kurang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memanfaatkan adanya digitalisasi dalam pembuatan pelaporan keuangan yang menggunakan aplikasi FMIS. pelaporan keuangan yang menggunakan aplikasi FMIS. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tumanduk et al., 2022) memberikan kesimpulan bahwa karena terjadi peralihan software aplikasi dari SIMDA ke FMIS, mengakibatkan pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal, terjadi beberapa kendala seperti, ada beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi apperror, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Aplikasi FMIS (*Finacial Management Information System*) Dalam Memenuhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan aplikasi FMIS dalam memenuhi akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Kep. Sangihe

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Hariyani (2018), menyatakan Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan pengidentifikasi, pengukuran dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut (Jonick, 2017) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan menafsirkan transaksi bisnis. Sedangkan Sastroatmodjo & Purnairawan (2021), Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pemangku keuangan dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Kasmir (2020) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian bisnis. Sedangkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Meiryani (2020) merupakan kumpulan unsur-unsur atau komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yaitu mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Paradiana (2017), akuntansi pemerintahan adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sumber daya keuangan mereka, termasuk pengeluaran, penerimaan, aset, kewajiban, dan modal. Akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah beserta penafsirannya, (Anwar Sadat, 2020).

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik. Bagi pemerintah, informasi publik digunakan untuk organisasi nirlaba seperti tempat ibadah, yayasan, pendidikan, rumah sakit, dan perguruan tinggi atau universitas.

Digitalisasi

Digitalisasi merupakan suatu proses konversi dari analog ke digital menggunakan teknologi digital dan data melalui sistem operasi otomatis dan sistem komputer. Digitalisasi mengacu pada proses mengubah informasi dari buku, rekaman audio, gambar atau video menjadi bit. Bit adalah satuan informasi yang berada dalam komputer. Adanya digitalisasi bertujuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan penyimpanan dan keamanan

dokumen dari berbagai situasi darurat seperti bencana. Selain itu, dokumen yang terdigitalisasi akan menjadikan kualitas suatu penyimpanan dapat ditingkatkan dari segi resolusi, gambar, dan suara, sehingga akan menjadi lebih stabil. Saat ini berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan teknologi, seperti telekomunikasi dan radio. Proses digital ini memerlukan berbagai peralatan, seperti komputer, scanner, dan software pendukung (Kurniati et al., 2021).

Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

Dener et al (2017) mendefinisikan Financial Management Information System (FMIS) sebagai serangkaian otomasi solusi terintegrasi yang memampukan pemerintah untuk merencanakan, mengeksekusi, dan memonitor anggaran, dengan membantu dalam prioritas, eksekusi dan pelaporan pengeluaran, serta mengawal dan melaporkan pendapatan. Aplikasi FMIS adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA yang sudah dibangun BPKP sejak 2003 dan digunakan secara massif oleh pemerintah daerah. FMIS merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi SIMDA FMIS juga mengintergrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis, sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atau transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan. Tujuan dari aplikasi FMIS adalah agar pemerintah dapat melakukan penatausahaan keuangan daerah yang baik serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah makin akuntabel mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan, dan BPKP dapat terus mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemda. Selain itu, data keuangan yang tersimpan dapat dimanfaatkan stakeholder untuk keperluan manajemen serta menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas. Menurut Mardiasmo (2018) fungsi akuntabilitas adalah:

1. Memberikan suatu pernyataan yang jelas mengenai ketepatan tujuan dan sasaran suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Mengukur suatu pencapaian dan perkembangan tujuan organisasi sesuai dengan program dan kebijakannya.
3. Sebagai alat kontrol untuk memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan awal.
4. Menyajikan informasi atau data akurat yang digunakan pemimpin sebagai dasar pengambilan keputusan
5. Mengkoordinasikan kebijakan untuk pengembangan kinerja.

Indikator Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan pelaporan laporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat diverifikasi, keakuratan informasi yang disajikan, isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Tujuan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelapor yang berguna bagi pengguna ketika membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan diharapkan bersifat kualitatif dengan karakteristik yang memadai. Apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak melewati karakteristik yang cukup maka hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan distribusi sumber daya yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, kemungkinan terjadinya kekurangan daerah, kurangnya pendapatan, kelemahan dalam administrasi, dan inefisiensi sumber daya (Mulyadita, 2021). Komponen-komponen pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca

3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Neraca
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penelitian Terdahulu

Penelitian Yuni Fitriani (2021) Keberadaan teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam banyak aspek kehidupan, terlebih lagi apabila kita mampu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut, salah satunya adalah munculnya aplikasi manajemen keuangan online sebagai media untuk mengatur atau mengelola keuangan baik keuangan pribadi maupun bisnis. Aplikasi keuangan online ini sangat memudahkan untuk merencanakan anggaran dan mencatat pengeluaran serta untuk membuat laporan keuangan. Dalam penelitian ini, aplikasi keuangan online meliputi aplikasi keuangan yang membantu mengelola keuangan pribadi atau individu, keluarga dan juga usaha seperti aplikasi keuangan online BukuKas, BukuWarung, Finansialku dan Money Lover. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semi deskriptif kuantitatif. Dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemanfaatan aplikasi keuangan online sebagai media untuk mengelola dan memanajemen keuangan. aplikasi keuangan online seperti BukuKas, BukuWarung, Finansialku dan juga Money Lover terbukti sangat bermanfaat dalam mengelola atau memanajemen keuangan pribadi atau individu, keluarga dan juga UMKM dengan baik, yaitu dalam hal mengatur pemasukan, pengeluaran, investasi, hutang piutang maupun laporan keuangannya. Selain itu lebih efektif dan efisien juga dalam segi waktu pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan online tersebut.

Penelitian Widjanarko dan Yuhertiana (2022) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan mengenai pemanfaatan menggunakan E-Commerce dan bagaimana kondisi pendapatan dengan menggunakan E-Commerce di masa pandemi Covid-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi kualitatif. Data dikumpulkan dalam bentuk deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari informan-informan dalam bentuk wawancara. Hasil analisis terhadap pemanfaatan E-Commerce dalam upaya peningkatan pendapatan di masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM DB Wood memaknai pengetahuan E-Commerce dengan melihat peluang memberanikan membuka bisnis diawal masa pandemi, merencanakan strategi, dan menjaga kepuasan konsumen untuk peningkatan pendapatan. E-Commerce juga memberikan keefektifan dan keefesienan waktu. Pendapatan UMKM DB Wood mengalami peningkatan dilihat dari penjualan produk mencapai 3.000 produk terjual. Dapat dikatakan pemanfaatan digitalisasi berbasis E-Commerce dapat memaksimalkan peningkatan pendapatan di masa pandemi Covid-19.

Penelitian Fatimah, Azizah, Iqbal, dan Aji (2024) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi SIMDA-NG FMIS di Inspektorat Daerah Kota Tegal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenisnya. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tegal telah menggunakan SIMDA FMIS dengan baik, menurut empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, tidak ada konflik antara pelaksana kebijakan dan perintah dari pembuat kebijakan dan tidak ada distorsi informasi. Indikator sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat tiga faktor yang memastikan keberhasilan penggunaan SIMDA-NG FMIS: sumber daya memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai; pegawai terlibat dalam pelatihan dan diklat; dan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan SIMDA-NG FMIS. Indikator disposisi (sikap), para implementor memiliki sikap positif terhadap kebijakan penggunaan aplikasi SIMDA-NG FMIS karena memungkinkan pegawai menyusun laporan keuangan dan memberikan bukti pendukung yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memonitor posisi keuangan dan pencapaian kinerja. Indikator struktur birokrasi, khususnya tingkat pengawasan telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh kelancaran penyampaian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA-NG FMIS

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti akan mengambil data yang diperlukan kemudian menganalisis data tersebut dan mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam bentuk tulisan yang akurat serta jelas sesuai dengan fakta yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis analisis deskriptif ini memberikan gambaran secara menyeluruh dan akurat mengenai keadaan objek yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan menyajikan uraian kalimat yang berasal dari informasi yang relevan dan data pendukung yang terkait langsung dengan penelitian.

Proses Analisis

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dan dokumentasi kepada kepala sub bagian keuangan terkait dengan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian.
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori data primer dan data sekunder.
3. Penyajian data, berupa uraian yang mempermudah dalam memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya. Peneliti akan mempelajari data kemudian mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh.
4. Penarikan kesimpulan, peneliti akan menarik kesimpulan dari seluruh data yang di analisis menjadi hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil analisis pemanfaatan aplikasi FMIS dalam memenuhi akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penggunaan aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB) Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dimulai sejak tahun 2021. Penggunaan FMIS dalam pembuatan laporan keuangan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Tahap Perencanaan Dinas PP & KB Kab. Kepl. Sangihe

Dalam menjalankan tugas dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahap perencanaan merupakan landasan utama untuk menggarisbawahi arah dan strategi yang akan diambil. Dinas ini memulai dengan mengevaluasi kondisi penduduk dan keluarga di wilayahnya, meliputi pola pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi, dan permasalahan sosial terkait. Evaluasi ini menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Setelah

evaluasi, mereka merumuskan visi dan misi yang akan menjadi panduan utama dalam proses perencanaan. Visi mereka, "Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang", memberikan arah bagi upaya-upaya yang dilakukan. Misi yang terdiri dari enam poin memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam menjalankan program-program di lapangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja yang detail, mencakup strategi, target yang spesifik, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Rencana kerja ini tidak hanya mencakup program-program jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan visi dan misi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Implementasi aplikasi FMIS pada perencanaan lima tahunan terdiri dari pembuatan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program daerah, urusan bidang, SKPD pelaksana, pendapatan dan pembiayaan.

Dokumen RPKD dibuat dengan merujuk pada Dokumen RPJMD yang telah diinputkan dalam aplikasi. Untuk bagian yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas, lokasi aktivitas, rincian aktivitas/belanja sudah merujuk pada Dokumen RPJMD dan akan otomatis terisi karena adanya proses Ambil Data RPJMD. Pemerintah Daerah bisa melakukan ubah data yang ada maupun menambahkan data apabila diperlukan. Penambahan data tetap merujuk pada Tujuan RPJMD yang sudah terisi. Data yang sudah ada ditarik dari Data RPJMD tidak bisa dihapuskan.

Tahap Pelaksanaan Dinas PP & KB Kab. Kepl. Sangihe

Berdasarkan hasil wawancara dinas PP & KB Kab. Kepl. Sangihe mulai melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan seksama. Mereka menyelenggarakan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk menjaga kualitas dan struktur penduduk yang seimbang. Selama tahap ini, Dinas ini bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas. Mereka juga memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan mereka. Pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program menjadi penekanan utama, dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat dan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Pengelolaan sumber daya secara efisien juga menjadi fokus, termasuk pengalokasian anggaran dan tenaga kerja yang tepat.

Tahap Penatausahaan Keuangan Dinas PP & KB Kab. Kepl. Sangihe

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa Penggunaan FMIS dalam penatausahaan ini mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara real-time, meningkatkan akurasi dan transparansi data keuangan, serta memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait. Dalam tahap penatausahaan, Dinas ini melakukan manajemen administrasi dan keuangan dengan baik. Mereka menggunakan aplikasi FMIS untuk mempermudah penatausahaan dan pembuatan laporan keuangan. Melalui aplikasi ini, mereka dapat mencetak berbagai jenis laporan, termasuk laporan operasional dan laporan realisasi anggaran per periode. Dengan memanfaatkan teknologi, Dinas ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan mereka. Melalui aplikasi FMIS, mereka dapat memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan terintegrasi dengan baik. Pengimplementasi FMIS tahap penatausahaan meliputi penganggaran, *setting* dan parameter penatausahaan, mekanisme non-anggaran, surat penyediaan dana (SPD), penerimaan pendapatan, belanja dengan uang persediaan, belanja dengan tambahan uang persediaan, belanja dengan mekanisme LS, menu SP2B dan SPB, transfer kasda.

Tahap Pelaporan Keuangan Dinas PP & KB Kab. Kepl. Sangihe

Pelaporan dimulai dengan perangkat daerah melakukan penginputan keuangan ke dalam aplikasi FMIS melalui kasubag keuangan, bendahara, dan operator, sehingga data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan belanja yang telah terjadi. Perangkat daerah juga dapat meminta pendampingan dari BPPKA untuk memastikan keakuratan data yang diinput. Setelah penginputan selesai dan diverifikasi oleh BPPKA, data tersebut akan dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahunan. LKPD ini kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penggunaan dana telah sesuai dengan peraturan dan transparan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban akan menekankan pada bahasan bagaimana menyiapkan Laporan Keuangan dengan Aplikasi FMIS. Laporan Keuangan akan tersaji secara otomatis oleh Program Aplikasi. Penggunaan FMIS dalam tahap ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan, mendukung tata kelola keuangan yang terintegrasi dan akuntabel.

Pembahasan

Dampak Penggunaan FMIS Pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menjalankan tugasnya dengan penerapan aplikasi FMIS. Dengan adanya aplikasi FMIS, Dinas PP & KB dapat mempermudah proses penatausahaan dan pembuatan laporan keuangan. Teknologi ini telah membantu menyederhanakan tugas-tugas administratif yang terkait dengan keuangan, sehingga memungkinkan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin penting terkait akuntabilitas keuangan dinas ini, adalah sebagai berikut:

1. Efisien

Financial Management Information System adalah sistem yang mengotomatiskan dan mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi. Pemakaian FMIS dalam pembuatan laporan keuangan dapat dikatakan efisien karena FMIS mengotomatiskan banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan data, dan pembuatan laporan keuangan. Ini mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan dalam penyusunan laporan. FMIS dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan. Hal ini mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi akibat human error. FMIS menghemat waktu dalam penyusunan laporan keuangan karena prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan tim keuangan untuk fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nasact, 2015) yang menyatakan FMIS sangat membantu efisiensi pengelolaan keuangan negara yang tentunya berdampak pada simplifikasi dan perampingan organisasi serta proses bisnis

2. Transparansi

Penggunaan FMIS dalam pembuatan laporan keuangan dapat dikatakan transparan karena FMIS dapat diakses oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Bendahara dan Operator atau pihak yang berkepentingan lainnya, untuk mengakses data secara real-time atau dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih terbuka dan transparan karena data dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Febrina, 2024) yang menyatakan Penerapan SIMDA FMIS dan SAP tidak hanya sekedar sebagai alat teknologi informasi, tetapi juga merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Tata Kelola Keuangan Yang Terintegratis

Pemakaian FMIS (Financial Management Information System) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang terintegrasi yaitu FMIS memungkinkan konsolidasi data keuangan dari berbagai departemen dan unit di dalam pemerintahan, FMIS membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan, FMIS memperkuat pengendalian internal dengan otomatisasi proses keuangan dan penerapan aturan dan kebijakan yang konsisten, pemantauan kinerja, dan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efisien. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmawita et.al, 2024) dimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menunjang integritas laporan keuangan telah dilaksanakan dengan 2 bentuk aplikasi yaitu Information Financial Management System (FMIS) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Aplikasi tersebut sangat membantu DPMD untuk melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sudah terintegrasi dengan seluruh SKPD Kabupaten Gowa, kedua aplikasi ini dapat menampilkan rerata realisasi setiap SKPD. aplikasi tersebut berfungsi sebagai Penatausahaan keuangan dari pembukuan, inventaris hingga melaporkan hal terkait anggaran yang saling terintegrasi dengan setiap SKPD.

Dibandingkan dengan metode pembuatan laporan keuangan secara non-digital, penggunaan aplikasi FMIS dianggap lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan penyincronan dengan data keuangan dari instansi terkait, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses penyusunan laporan. Sebagai hasilnya, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Implementasi aplikasi FMIS juga telah mewujudkan transparansi dalam laporan keuangan. Sistem berbasis teknologi ini memungkinkan akses informasi keuangan secara transparan, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Selain itu, aplikasi FMIS juga membantu dalam menciptakan tata kelola keuangan yang terintegrasi, dengan menyediakan output laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun perbedaan SIMDA dan FMIS yaitu SIMDA lebih terfokus pada administrasi keuangan di tingkat lokal, seperti pengelolaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan administrasi perpajakan, sedangkan FMIS lebih luas dalam cakupannya, mencakup seluruh siklus keuangan dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaporan keuangan, pengelolaan dana, hingga audit dan akuntansi pemerintah. SIMDA diterapkan di tingkat pemerintah daerah atau kabupaten/kota sedangkan FMIS dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat (nasional) dan dapat juga diterapkan di tingkat pemerintah daerah untuk integrasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menunjukkan komitmen dalam memastikan akuntabilitas keuangan melalui penerapan aplikasi FMIS. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siti Fatimah et.al, 2024) dimana Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal telah berjalan dengan efektif, sehingga indikator struktur birokrasi khususnya tingkat pengawasan telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh kelancaran penyampaian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA-NG FMIS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan menyelenggarakan program keluarga berencana di wilayahnya.
2. Penggunaan aplikasi FMIS telah membantu meningkatkan efisiensi, akurasi dalam penatausahaan dan pembuatan laporan keuangan serta berhasil meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
3. Penggunaan aplikasi FMIS meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa memanfaatkan teknologi selain FMIS seperti sistem informasi geografis (SIG) atau aplikasi lainnya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan analisis data.
2. Penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan, guna memastikan pencapaian tujuan dan mendeteksi perubahan yang diperlukan pada FMIS.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan digitalisasi pada aplikasi FMIS dalam memenuhi akuntabilitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Azzindani, R., & M. Irwan. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>

Febrina, L. E. (2024). Pemanfaatan Sistem Otomasi Aplikasi Berbasis Web Simda FMIS Sebagai Efektivitas Kinerja Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten X (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Diakses pada februari 2024 <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/50157/20312245.pdf?sequence=1>

Dewi, P. A. P. L., Animah, A., & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72-86. Diakses Juni 2023 <https://stieamm.ac.id/jurnal/valid/article/view/195>

Dener, C. (2017), FMIS and Open Budget Data Global Dataset, World Bank

Fitriani, Y. (2021). Analisa Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Online Sebagai Media Untuk Mengelola Atau Memanajemen Keuangan. *JISAMAR (Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research)*, 5(2), 454-461. Diakses pada Juni 2023 <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/432>

Fatimah, S., Azizah, V. N., Iqbal, A. D., & Aji, G. (2024). Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui SIMDA-NG FMIS Pada Inspektorat Daerah Kota Tegal. *Akuntansi*, 3(1), 101-111. Diakses ada Agustus 2024 <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/1470>

Hariyani D. S. (2018). Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Aditya Media Publishing. Malang

Jonick, C. (2017). *Principles of Financial Accounting*. University of North Georgia Press Dahlonega. Georgia.

Kasmir.(2020). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta

Kurniati, E., Lestari, M., Aprilianti, L., & Febyanti, A. (2021). Digitalisasi Sistem Informasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Data Digitalization of Sistem Informasi at Early Childhood Program to Increase the Effectiveness and Efficiency of Data Management. *Jurnal Ilmiah PESONA PAUD*, 8(2), 105–119. Diakses pada Juni 2023 <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/paud/article/view/115111>

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. ANDI. Yogyakarta

Mulyadita, R. (2021). Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 34–42. Diakses pada Juni 2023 <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1690>

Meiryan. 2020. Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Faktor – Faktor yang Memengaruhi, Kencana. Jakarta

NASACT. (2015). How are Digital Trends Reshaping government financial organization Finding from Deloitte NASACT 2015 Digital Government Transformation Survey 2015.

Paradiana, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan: Konsep, Aplikasi, dan Isu-isu Kontemporer. Salemba Empat. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah

Rohma,F.F., Agustina, B., & Gymnastiar, M. (2023). Implementasi E-Accounting Dan Efektivitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Bpkad Kota Surabaya. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi)*, 11(2),09,22. Di akses pada Juni 2023 <https://doi.org/10.33508/jrma.v11i2.1163ISSN>

Rahmayanti, S., Syaumudinsyah, Kurniati, N., & Nur wahidah. (2023). Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS Financial Management Information System) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(2), 469–482. Diakses pada Juni 2023 <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/264>

Rasyid, R., Sumarlin, S., & Fadhilatunnisa, D. (2024). Implementation Of Regional Financial Accounting System In Improving The Integrity Of Local Government Financial Statements. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 5(1), 73-82. Diakses pada agustus 2024 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/47982>

Sadat, A. (2020). Govermentail Aiccounting (Akuntansi Pemerintahan). Deepubliish .Yogyakarta

Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). Pengantar Akuntansi. CV.Media Sains Indonesia. Bandung

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA

Rahayu, S. A. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika

Tumanduk, A. V., Gamaliel, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 17(4), 2022, 214-224. Diakses pada Juni 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/43878>

Widjanarko, A.R.W., & Yuhertiana,I. (2022). Analisis Pemanfaatan E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Umkm Db Wood Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1556-1559 diakses pada Juni 2023 <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2574>